PUBLISITAS
Journal of Social Sciences and Politics

Volume 13, Number 1, Oktober 2026
P-ISSN: 2252-4150
E-ISSN: 2716-3474

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA BAGI KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA

IMPLEMENTATION OF THE "ONE FAMILY, ONE BACHELOR" SCHOLARSHIP POLICY FOR UNDERPRIVILEGED FAMILIES IN SURABAYA CITY

Mawar Alifiaty Lestari [1*], Rudy Handoko [2], Ghulam Maulana Ilman [3]

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia [1,2,3]

**Corresponding author: mawaralifiaty99@gmail.com*

ARTICLE INFO

Submitted:
January 13, 2025
Review:
January 21, 2025
Accepted:
February 9, 2025
Available online:
October 31, 2026

Article Citation (APA) :
Lestari, M., Handoko, R., & Ilman, G. (2026). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEASISWA 1 KELUARGA 1 SARJANA DALAM PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI BAGI KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Publisitas*, *13*(1), 64-79. https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.697

DOI: *https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.697*

ABSTRAK

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (1K1S) merupakan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang ditujukan untuk memberikan dukungan pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program 1K1S serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada November 2025-Februari 2026. Informan berjumlah tujuh orang yang terdiri atas staf Dinas Sosial, pengelola UPTD Kampung Anak Negeri, mitra Yayasan Bhakti Persatuan, perwakilan perguruan tinggi mitra, dan mahasiswa penerima manfaat. Analisis menggunakan enam variabel Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran program telah dipahami oleh pelaksana dan penerima, sumber daya pendidikan dan fasilitas pendukung telah tersedia meskipun masih terdapat keterbatasan perangkat belajar dan personel, serta koordinasi antaraktor telah berlangsung melalui rapat, laporan, MoU, dan komunikasi langsung. Hambatan utama meliputi belum lengkapnya data calon sasaran, penyampaian informasi kepada masyarakat yang belum merata, perbedaan prosedur administrasi antarlembaga, keterbatasan personel, ketergantungan pada inisiatif individu, serta tantangan sosial dan akademik mahasiswa. Temuan menunjukkan bahwa Program 1K1S telah menyediakan dukungan pendidikan dan fasilitas bagi penerima manfaat, tetapi penelitian ini belum dapat menilai outcome jangka panjang seperti kelulusan atau perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Beasiswa Pendidikan; Akses Pendidikan Tinggi; Keluarga Miskin; Kota Surabaya.

ABSTRACT

The One Family One Graduate (1K1S) Program is a policy of the Surabaya City Government designed to provide higher education support for students from poor families. This study aims to analyze the implementation of the 1K1S Program and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were

Copyright © (2026) Jurnal Publisitas, P-ISSN: 2252-4150, E-ISSN: 2716-3474
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

collected through interviews, observation, and documentation from November 2025 to February 2026. Seven informants were selected purposively, consisting of a Surabaya City Social Service staff member, an administrator of the Kampung Anak Negeri Technical Implementation Unit, a representative of Yayasan Bhakti Persatuan, two representatives of partner universities, and two scholarship recipients. The analysis was based on six variables of the Van Meter and Van Horn implementation model: policy standards and objectives, resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political conditions, and the disposition of implementers. The findings show that the program's objectives and target criteria are understood by implementers and beneficiaries. Educational funding and supporting facilities are available, although limitations remain in personal learning devices and personnel capacity. Interorganizational coordination has been conducted through meetings, reports, memoranda of understanding, and direct communication. The main barriers include incomplete data on potential target beneficiaries, uneven dissemination of program information, differences in administrative procedures among partner institutions, limited personnel, reliance on individual initiative, and students' social and academic adjustment challenges. The findings indicate that the 1K1S Program has provided educational and supporting facilities to beneficiaries; however, this study does not assess long-term outcomes such as graduation or changes in family economic conditions.

***Keywords**: Policy Implementation; Educational Scholarship; Access to Higher Education; Poor Families; Surabaya City*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Novitasari et al., 2025). Namun, akses terhadap pendidikan tinggi masih belum merata, terutama bagi masyarakat dari keluarga berpenghasilan rendah (Siburian, 2024). Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut tercermin dari masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang dapat menghambat keberlanjutan pendidikan ke perguruan tinggi (Asnawi et al., 2021). Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur masih mencatat angka putus sekolah yang cukup tinggi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia di Kota Surabaya Tahun 2024

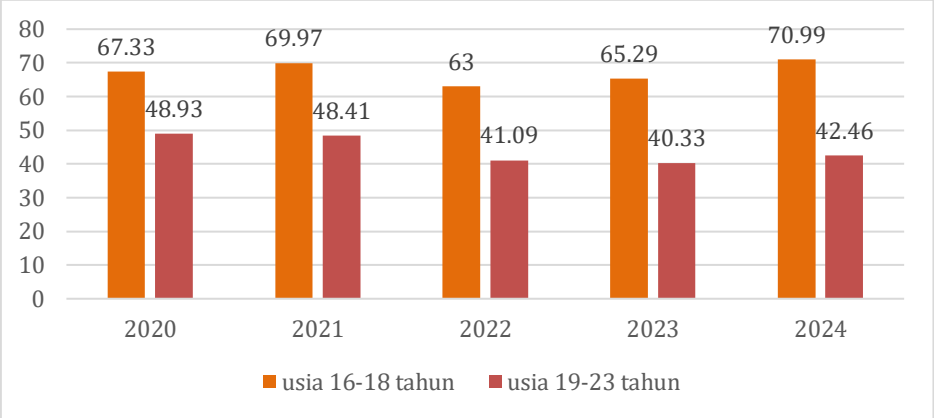
Kelompok Usia	APS (%)
7-12 tahun	98,81
13-15 tahun	99,95
16-18 tahun	70,99

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2024*, Susenas Maret 2024.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa APS Kota Surabaya tahun 2024 sebesar 98,81% pada usia 7–12 tahun, 99,95% pada usia 13–15 tahun, dan 70,99% pada usia 16–18 tahun. Capaian pada kelompok usia 16–18 tahun lebih rendah dibandingkan kelompok usia sebelumnya, sehingga keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMA/sederajat masih perlu mendapat perhatian (Yusup et al., 2019). APS tidak secara langsung mengukur akses perguruan tinggi, tetapi dapat menjadi gambaran partisipasi pendidikan sebelum memasuki jenjang tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan pendidikan, khususnya bagi lulusan SMA/sederajat dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Irianto et al., 2024). Pemerintah Kota Surabaya merespons kebutuhan

tersebut melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (1K1S) yang diluncurkan pada tahun 2024. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/sederajat dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Fitri & Novandri, 2022).

Grafik 1. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia ke Jenjang Kuliah 2020-2024 di Surabaya



Sumber: (BPS, 2024 dan diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2024, APS Kota Surabaya pada kelompok usia 16–18 tahun sebesar 70,99%, sedangkan usia 19–23 tahun sebesar 42,46%. APS usia 19–23 tahun digunakan sebagai gambaran partisipasi pendidikan pada rentang usia perguruan tinggi, bukan sebagai ukuran langsung akses ke perguruan tinggi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada usia 19–23 tahun masih lebih rendah dibandingkan usia 16–18 tahun, sehingga diperlukan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan menuju jenjang perguruan tinggi (Hussein et al., 2023).

Sebagai respons terhadap persoalan akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (1K1S) pada 26 Agustus 2024 (Pemerintah Kota Surabaya, 2024a). Program ini ditujukan bagi lulusan SMA/sederajat dari keluarga kurang mampu yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang Diploma (D3) dan Sarjana (S1), dengan penekanan pada pendidikan vokasi yang dinilai memiliki peluang penyerapan kerja lebih cepat (Khairiyah & Zulkarnaini, 2021). Pada tahap awal, program menyediakan kuota sebanyak 200 mahasiswa dari keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan Angka Lama Sekolah, memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi putus sekolah melalui keberlanjutan pendidikan, meningkatkan taraf hidup keluarga, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Kota Surabaya. Pelaksanaan program melibatkan Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Sosial, UPTD Kampung Anak Negeri sebagai pengelola Asrama Bibit Unggul, perguruan tinggi mitra, dan pihak swasta. Dukungan perguruan tinggi mitra diwujudkan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seperti Poltekkes Kemenkes Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Airlangga (UNAIR), dan UPN "Veteran" Jawa Timur, serta Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meliputi Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, STIKES Hang Tuah Surabaya, dan Universitas Surabaya (UBAYA). Dinas Sosial berperan dalam pendataan dan verifikasi keluarga miskin, sedangkan perguruan tinggi mitra terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dan administrasi akademik penerima program (Pemerintah Kota Surabaya, 2024b).

Data pelaksanaan Program 1K1S menunjukkan bahwa sebanyak 161 mahasiswa telah menjadi penerima manfaat dari kuota awal 200 mahasiswa atau mencapai 80,5%. Penerima program memperoleh pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), uang saku sebesar Rp500.000 per bulan, fasilitas tempat tinggal di Asrama Bibit Unggul, makan tiga kali sehari, serta pembinaan selama masa studi. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan dan memberikan dukungan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dari keluarga miskin atau prasejahtera (Almashuri & Subandi, 2021). Namun, capaian 161 penerima belum dapat digunakan untuk menentukan tingkat cakupan program terhadap seluruh kelompok sasaran karena belum tersedia data pembanding mengenai jumlah keluarga miskin atau prasejahtera yang memiliki anak lulusan SMA/sederajat dan memenuhi kriteria penerima. Data mengenai jumlah pendaftar dan jumlah calon penerima yang tidak lolos juga belum tersedia secara memadai, sehingga ketepatan sasaran dan cakupan program belum dapat dihitung secara menyeluruh.

Penetapan sasaran Program 1K1S berkaitan dengan data keluarga miskin yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya. Dinas Sosial berperan dalam menyediakan fasilitas dan melakukan pendataan keluarga miskin sebagai bagian dari proses penetapan calon penerima. Mekanisme tersebut dilakukan melalui penyaringan dan pemeriksaan administratif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah sehingga calon penerima yang berasal dari keluarga miskin dapat mengikuti tahapan seleksi program. Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, penerima juga mengikuti proses seleksi dan tes masuk perguruan tinggi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan pendidikan, tetapi juga mencakup proses penetapan sasaran dan seleksi penerima (Rahmawati & Adi, 2024). Program 1K1S didukung oleh Asrama Bibit Unggul yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus sarana pembinaan akademik dan karakter bagi penerima manfaat. Pembinaan yang diberikan meliputi bahasa Inggris, public speaking, pengembangan keterampilan, pendampingan akademik, dan pembinaan nonakademik. Fasilitas tersebut memiliki daya tampung 200 mahasiswa dan dilengkapi dengan permakanan tiga kali sehari. Sumber pembiayaan program berasal dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) atau sektor swasta melalui skema orang tua asuh, salah satunya Yayasan Bhakti Persatuan. Bantuan yang diterima mahasiswa tidak hanya berupa pembiayaan UKT, tetapi juga uang saku, tempat tinggal, permakanan, dan pembinaan selama masa studi. Estimasi kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar Rp52,5 juta per mahasiswa selama tiga tahun masa kuliah.

Secara regulatif, pelaksanaan Program 1K1S perlu dipahami berdasarkan perkembangan aturan pemberian beasiswa di Kota Surabaya. Program yang diluncurkan pada tahun 2024 tidak pertama kali dibentuk melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025. Pada saat program mulai dilaksanakan, pemberian beasiswa di Kota Surabaya telah memiliki dasar pengaturan melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Pemerintah Kota Surabaya, 2022). Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Pemerintah Kota Surabaya, 2025). Perubahan regulasi tersebut perlu diperhatikan karena diterbitkan setelah Program 1K1S mulai berjalan, sehingga terdapat perkembangan pengaturan mengenai mekanisme pemberian beasiswa, persyaratan penerima, proses seleksi dan penetapan, penganggaran, pembagian tugas pelaksana, serta monitoring dan pertanggungjawaban program. Kondisi

tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana perubahan regulasi memengaruhi pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2024.

Pelaksanaan Program 1K1S melibatkan sejumlah organisasi dengan tugas dan kepentingan yang berbeda, sehingga keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bantuan pendidikan. Dinas Sosial, UPTD Kampung Anak Negeri, perguruan tinggi mitra, Yayasan Bhakti Persatuan, dan penerima manfaat memiliki peran yang saling berkaitan dalam pendataan, seleksi, pembiayaan UKT, pemberian uang saku, pengelolaan asrama, pendampingan mahasiswa, serta pemantauan perkembangan studi. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai program belum sepenuhnya merata. Publikasi melalui media sosial dan pemberitaan telah dilakukan, tetapi informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pendaftaran belum seluruhnya disampaikan secara rinci, sedangkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat juga belum menjangkau seluruh kelompok sasaran. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan mekanisme Program 1K1S.

Selain persoalan penyebaran informasi, pelaksanaan program juga menghadapi persoalan keterbukaan data dan koordinasi antaraktor. Informasi mengenai jumlah penerima, pembiayaan program, rincian besaran UKT, serta kapasitas pembiayaan setiap tahun belum sepenuhnya tersedia secara terbuka. Program yang melibatkan pemerintah daerah, pelaksana teknis, perguruan tinggi, dan pihak swasta juga memerlukan koordinasi dalam pelaksanaan administrasi, pembayaran UKT, pemberian bantuan, pendampingan, serta pelaporan perkembangan studi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melihat komunikasi antarorganisasi, ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaksana, dan komitmen setiap pihak dalam menjalankan program. Aspek transparansi dan akuntabilitas juga perlu dianalisis berdasarkan data lapangan agar dapat diketahui sejauh mana pengelolaan program telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian mengenai beasiswa daerah sebelumnya telah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, ketepatan sasaran, serta dukungan pembiayaan. Penelitian mengenai Program 1K1S di Kota Surabaya juga telah dilakukan dengan menggunakan model implementasi Edward III yang menitikberatkan pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Safira et al., 2025). Penelitian ini memiliki perbedaan pada penggunaan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang menganalisis kebijakan melalui enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Penggunaan model tersebut memungkinkan penelitian melihat pelaksanaan 1K1S tidak hanya dari mekanisme birokrasi, tetapi juga dari kejelasan sasaran, kecukupan sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi lingkungan sasaran, dan sikap pelaksana terhadap kebijakan. Penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis implementasi Program 1K1S sebagai kebijakan pendidikan daerah yang melibatkan pemerintah, organisasi pelaksana, perguruan tinggi, mitra pendanaan, dan penerima manfaat dalam satu rangkaian pelaksanaan kebijakan. Perhatian penelitian diarahkan pada hubungan antara standar dan sasaran kebijakan dengan ketepatan penerima, penggunaan sumber daya pemerintah dan sektor swasta, pembagian peran antarlembaga, proses komunikasi dan koordinasi, kondisi sosial ekonomi keluarga sasaran, serta disposisi pelaksana. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih terarah mengenai pelaksanaan kebijakan beasiswa daerah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga

miskin, sekaligus menunjukkan faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian tujuan program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin di Kota Surabaya. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis implementasi program berdasarkan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program; serta mendeskripsikan akses pendidikan tinggi yang diberikan kepada penerima manfaat melalui bantuan biaya pendidikan, fasilitas pendukung, dan keberlanjutan studi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan implementasi kebijakan publik dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam memperbaiki pelaksanaan Program 1K1S.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus implementasi kebijakan untuk memahami pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (1K1S) di Kota Surabaya. Unit analisis penelitian adalah proses implementasi Program 1K1S, meliputi pelaksanaan program, koordinasi antaraktor, pemanfaatan sumber daya, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses dan pengalaman aktor yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program, bukan pada pengukuran hubungan statistik maupun evaluasi outcome. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program (Creswell & Poth, 2016).

Penelitian dilaksanakan di Kota Surabaya dengan lokasi pengumpulan data pada Dinas Sosial Kota Surabaya, UPTD Kampung Anak Negeri/Asrama Bibit Unggul, mitra swasta, dan perguruan tinggi mitra. Pemilihan lokasi didasarkan pada keterlibatan langsung lembaga-lembaga tersebut dalam pelaksanaan Program 1K1S. Penelitian berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, kewenangan, dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan Program 1K1S. Informan berjumlah tujuh orang, terdiri atas satu staf Dinas Sosial Kota Surabaya, satu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri, satu perwakilan Yayasan Bhakti Persatuan, dua perwakilan perguruan tinggi mitra, serta dua mahasiswa penerima manfaat. Dinas Sosial dipilih karena berperan dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program, UPTD/asrama karena menangani pelaksanaan teknis dan pembinaan, yayasan karena terlibat sebagai mitra pendukung, perguruan tinggi karena berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan administrasi akademik, sedangkan penerima manfaat dipilih untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi. Kriteria tersebut digunakan agar informasi diperoleh dari pihak pemerintah, pelaksana teknis, mitra pendanaan, perguruan tinggi, dan penerima manfaat.

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No.	Inisial	Jabatan/Peran	Alasan Pemilihan
1.	S.K	Staf Dinas Sosial Kota Surabaya	Memahami pengelolaan data kemiskinan dan verifikasi keluarga miskin serta pelaksanaan program.
2.	V.Y.F	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri	Memahami pengelolaan asrama, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan mahasiswa.
3.	S.Y	Staf Sekretariat Yayasan Bhakti Persatuan	Memahami peran mitra swasta dalam mendukung pembiayaan program.
4.	E.S.R	Kasubag Administrasi Akademik Politeknik Kesehatan Surabaya	Memahami administrasi akademik dan koordinasi perguruan tinggi dengan pihak program.
5.	L.M	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas	Memahami dukungan akademik dan koordinasi perguruan tinggi dalam pelaksanaan program.
6.	R	Mahasiswa penerima beasiswa	Memberikan informasi mengenai pengalaman dan kendala sebagai penerima manfaat.
7.	F	Mahasiswa penerima beasiswa	Memberikan informasi mengenai pengalaman dan kendala sebagai penerima manfaat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan disposisi pelaksana. Standar dan sasaran diarahkan pada kejelasan tujuan, kriteria penerima, dan capaian penerima; sumber daya meliputi anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, UKT, uang saku, asrama, permakanan, serta pendampingan; komunikasi antarorganisasi mencakup koordinasi, penyampaian informasi, pendataan, pembayaran, pelaporan, dan penyelesaian kendala; karakteristik agen pelaksana mencakup pembagian tugas, struktur, dan kemampuan lembaga; kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup kondisi keluarga penerima, kebutuhan mahasiswa, lingkungan sosial, serta dukungan pemerintah; sedangkan disposisi pelaksana mencakup komitmen, respons, kepedulian, pendampingan, dan pengawasan. Keenam variabel tersebut menjadi dasar penyusunan tema dan pertanyaan wawancara serta pengelompokan data penelitian.

Proses analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil wawancara ditranskripsikan dan dilakukan coding berdasarkan enam variabel Van Meter dan Van Horn. Data yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan menjadi kategori dan tema, kemudian dipetakan berdasarkan aktor yang memberikan informasi. Peneliti menyusun matriks untuk membandingkan informasi antara Dinas Sosial, UPTD/asrama, yayasan, perguruan tinggi, dan mahasiswa penerima manfaat. Perbedaan informasi antarsumber diperiksa melalui wawancara ulang, observasi, dan dokumen pendukung sehingga interpretasi tidak hanya didasarkan pada satu sumber (Sugiyono, 2020). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi antaraktor serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumen. Wawancara dilakukan setelah informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian dan memberikan persetujuan untuk berpartisipasi. Identitas informan dalam penyajian hasil disamarkan menggunakan kode atau inisial. Pengumpulan data dihentikan setelah informasi yang diperoleh telah memadai untuk menjelaskan enam

variabel implementasi dan tidak ditemukan tema substantif baru. Proses penelitian juga didukung pencatatan dan dokumentasi agar setiap tahap pengumpulan dan analisis data dapat ditelusuri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (1K1S) di Kota Surabaya dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri atas enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975). Keenam variabel tersebut digunakan untuk melihat pelaksanaan program, hubungan kerja antaraktor, dukungan sumber daya, kondisi lingkungan implementasi, serta sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian disajikan berdasarkan keenam variabel tersebut agar hubungan antara temuan lapangan dan kerangka teori dapat terlihat secara langsung.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Tujuan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (1K1S) diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin di Kota Surabaya melalui pemberian dukungan pendidikan kepada anggota keluarga yang memenuhi ketentuan sebagai penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut dipahami oleh pelaksana maupun penerima manfaat sebagai upaya memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Staf Dinas Sosial Kota Surabaya menjelaskan bahwa program diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan kuliah kepada keluarga miskin. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai berikut: *"Tujuan Program 1K1S ini adalah memutus rantai kemiskinan di Surabaya. Kami ingin memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang sebelumnya merasa tidak mungkin berkuliah agar bisa mendapatkan akses ke jenjang sarjana."* (S.K, Staf Dinas Sosial Kota Surabaya, wawancara 8 Desember 2025). Pemahaman yang sama juga terlihat pada tingkat pelaksana teknis. Pengelola Asrama Bibit Unggul menjelaskan bahwa program diarahkan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan dukungan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, pendampingan, dan pengawasan selama masa studi.

Kejelasan tujuan tersebut menunjukkan bahwa standar kebijakan telah diterjemahkan ke dalam arah pelaksanaan yang relatif seragam. Penerima manfaat juga memahami program sebagai kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa harus menanggung seluruh biaya pendidikan secara mandiri. Salah satu mahasiswa penerima manfaat menyampaikan: *"Saya pertama kali tahu program ini dari pengumuman di kelurahan, lalu pendamping PKH juga menjelaskan lebih rinci ke orang tua saya. Dari situ saya paham kalau ini kesempatan emas dari Pemerintah Kota Surabaya supaya anak-anak dari keluarga miskin bisa kuliah di kampus yang bagus secara gratis sampai lulus."* (R, mahasiswa penerima manfaat, wawancara 9 Februari 2026). Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesesuaian pemahaman mengenai tujuan program antara pelaksana dan penerima manfaat. Namun, pemahaman tersebut tidak secara langsung menunjukkan ketepatan sasaran program.

Ketepatan sasaran Program 1K1S ditentukan melalui identifikasi keluarga miskin, pemanfaatan basis data kemiskinan, serta verifikasi kondisi keluarga di lapangan. Calon penerima berasal dari lulusan SMA/SMK dari keluarga miskin dan memiliki Kartu Keluarga

Surabaya. Proses penetapan dilakukan melalui penyaringan data keluarga miskin yang dilanjutkan dengan verifikasi kondisi ekonomi dan pengeluaran keluarga sebelum penerima ditetapkan. Program memiliki kuota awal 200 mahasiswa dan telah menjangkau 161 penerima atau 80,5% dari kuota. Capaian tersebut menunjukkan jumlah penerima terhadap kuota, tetapi belum cukup untuk menilai ketepatan sasaran secara keseluruhan. Penelitian ini belum memiliki data lengkap mengenai jumlah keluarga yang memenuhi kriteria, calon sasaran potensial, pendaftar, dan peserta yang lolos seleksi. Oleh karena itu, inclusion error, exclusion error, dan rasio pendaftar terhadap penerima belum dapat dihitung. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme penetapan telah diarahkan kepada keluarga miskin, sedangkan penilaian ketepatan sasaran masih memerlukan data administratif yang lebih lengkap.

2. Sumber Daya

Sumber daya Program 1K1S mencakup pembiayaan, fasilitas, sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program menyediakan kombinasi sumber daya finansial dan nonfinansial untuk mendukung mahasiswa selama mengikuti pendidikan tinggi. Setiap mahasiswa diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp52.500.000 selama tiga tahun, yang mencakup UKT selama enam semester, kebutuhan perkuliahan, dan uang saku. Mahasiswa memperoleh uang saku sebesar Rp500.000 per bulan, sedangkan pembayaran UKT dilakukan berdasarkan tagihan masing-masing perguruan tinggi mitra.

Sumber pembiayaan program terbagi antara Pemerintah Kota Surabaya dan mitra swasta. Pemerintah Kota Surabaya melalui APBD mendukung operasional Asrama Bibit Unggul, permakanan, fasilitas tempat tinggal, dan kebutuhan dasar mahasiswa. Yayasan Bhakti Persatuan melalui skema CSR mendukung pembiayaan UKT dan uang saku mahasiswa. Staf Dinas Sosial menjelaskan: *"Anggaran dibagi menjadi dua sumber utama. Fasilitas operasional asrama dan kebutuhan makan (permakanan) ditanggung oleh APBD Kota Surabaya yang masuk di UPTD Kampung Anak Negeri. Sementara biaya UKT dan uang saku mahasiswa itu pure berasal dari kerjasama CSR/Sektor Swasta (seperti Yayasan Bhakti Persatuan)."* (S.K, Staf Dinas Sosial Kota Surabaya, wawancara 8 Desember 2025). Pola pembiayaan tersebut menunjukkan adanya pembagian sumber dana antara pemerintah daerah dan sektor swasta.

Dukungan nonfinansial diberikan melalui Asrama Bibit Unggul berkapasitas 200 mahasiswa, meliputi tempat tinggal, makan tiga kali sehari, komputer, internet, ruang belajar, transportasi, pembinaan, dan pendampingan. Perguruan tinggi mitra juga menyediakan laboratorium, perpustakaan, bimbingan akademik, pelatihan teknologi, dan layanan psikologis sesuai fasilitas yang tersedia. Dukungan tersebut membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa selama menjalani studi. Kecukupan sumber daya masih memiliki keterbatasan. Sebagian mahasiswa membutuhkan perangkat belajar pribadi, terutama laptop, serta dukungan penguasaan teknologi dan penyesuaian akademik. UPTD juga menghadapi keterbatasan personel sehingga beberapa petugas menjalankan tugas rangkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan mahasiswa dan pelaksana.

Tabel 3. Jenis dan Bentuk Dukungan Program 1K1S

No.	Jenis Sumber Daya	Bentuk Dukungan	Penanggung Jawab/Sumber Dana
1	Finansial	Pembayaran UKT selama masa studi	Yayasan Bhakti Persatuan melalui CSR
2	Finansial	Uang saku Rp500.000 per bulan	Yayasan Bhakti Persatuan
3	Finansial	Permakanan tiga kali sehari	Pemerintah Kota Surabaya melalui APBD/UPTD
4	Finansial	Operasional asrama dan fasilitas pendukung	Pemerintah Kota Surabaya melalui APBD
5	Nonfinansial	Kamar, tempat tidur, lemari, dan kamar mandi	UPTD Kampung Anak Negeri
6	Nonfinansial	Komputer, internet, dan alat tulis	UPTD Kampung Anak Negeri
7	Nonfinansial	Transportasi antar-jemput ke kampus	Dinas Perhubungan Kota Surabaya
8	Nonfinansial	Pembinaan kedisiplinan dan motivasi	UPTD Kampung Anak Negeri
9	Nonfinansial	Akses laboratorium dan perpustakaan	Perguruan tinggi mitra
10	Nonfinansial	Bimbingan akademik dan pemantauan IPK	Program studi/dosen wali
11	Nonfinansial	Pelatihan penggunaan teknologi	Perguruan tinggi mitra
12	Nonfinansial	Layanan psikologis dan penguatan kepercayaan diri	Perguruan tinggi mitra

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2026

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Pelaksanaan Program 1K1S melibatkan Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Sosial, UPTD Kampung Anak Negeri/Asrama Bibit Unggul, perguruan tinggi mitra, Yayasan Bhakti Persatuan, serta kelurahan dan pendamping PKH. Komunikasi diperlukan dalam pendataan, verifikasi, penetapan penerima, pembayaran UKT, pemberian uang saku, pengelolaan asrama, pemantauan akademik, dan penyelesaian masalah mahasiswa. Komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, MoU, surat, laporan berkala, grup WhatsApp, dan komunikasi langsung. Saluran tersebut mendukung validasi data, pencairan beasiswa, evaluasi, serta penyelesaian persoalan teknis. Koordinasi akademik dilakukan melalui laporan dan rapat evaluasi. Poltekkes melaporkan perkembangan mahasiswa kepada Pemerintah Kota dan yayasan, sedangkan masalah yang belum terselesaikan pada tingkat program studi diteruskan kepada manajemen perguruan tinggi. MoU Pemerintah Kota Surabaya dan UHW Perbanas juga menjadi dasar kerja sama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kendala komunikasi masih ditemukan pada perbedaan alur administrasi antarlembaga, terutama pembayaran UKT, pelaporan akademik, dan koordinasi perguruan tinggi dengan pengelola program. Penyampaian informasi kepada calon penerima juga belum merata sehingga sebagian masih kurang memahami persyaratan, prosedur, perguruan tinggi mitra, dan bentuk bantuan. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi internal relatif mendukung pelaksanaan, sedangkan komunikasi eksternal memerlukan penguatan melalui prosedur yang seragam, pembagian kewenangan yang jelas, pencatatan keputusan, dan format pelaporan yang sama.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana Program 1K1S terlihat dari struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, kapasitas, dan beban kerja. Pemerintah Kota dan Dinas Sosial berperan dalam perencanaan, pendataan, verifikasi, pendanaan, dan pengawasan; UPTD Kampung Anak Negeri mengelola asrama dan pembinaan harian; perguruan tinggi

menjalankan pendidikan serta layanan akademik; sedangkan Yayasan Bhakti Persatuan mendukung pembiayaan melalui CSR dan pemantauan bantuan. Pembagian tersebut menunjukkan pelaksanaan program melibatkan beberapa lembaga dengan fungsi yang saling melengkapi. UPTD telah memiliki pembagian tugas administrasi, pengawasan, dan pendampingan, tetapi keterbatasan personel menyebabkan adanya tugas rangkap. Perguruan tinggi juga menyediakan bimbingan akademik, layanan psikologis, pelatihan teknologi, dan pemantauan IPK. Kelemahan masih terlihat pada ketergantungan terhadap inisiatif individu, terutama dalam bantuan tambahan dan jejaring magang. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan agar pelaksanaan program tidak terlalu bergantung pada inisiatif personal.

Tabel 4. Pemetaan Aktor Pelaksanaan dan Perannya dalam Program 1K1S

Aktor	Peran Utama	Kapasitas/Temuan Pelaksanaan
Pemerintah Kota Surabaya	Perumusan kebijakan, pendanaan, dan koordinasi	Memberikan dukungan kebijakan dan anggaran
Dinas Sosial	Pendataan, verifikasi, dan pengawasan	Memiliki akses terhadap basis data kemiskinan dan melakukan verifikasi lapangan
UPTD Kampung Anak Negeri	Pengelolaan asrama dan pembinaan	Menjalankan pendampingan harian, tetapi menghadapi rangkap tugas personel
Perguruan tinggi mitra	Pendidikan, administrasi akademik, dan pendampingan	Menyediakan layanan akademik, pemantauan studi, dan dukungan tambahan
Yayasan Bhakti Persatuan	Dukungan pembiayaan dan pemantauan	Mendukung UKT dan uang saku melalui skema CSR
Mahasiswa penerima manfaat	Penerima dan pelaksana kewajiban program	Mengikuti pendidikan, tata tertib, dan kegiatan pembinaan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2026

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan kebutuhan terhadap Program 1K1S. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa penerima berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, termasuk keluarga dengan orang tua yang bekerja pada sektor informal atau pekerjaan dengan penghasilan terbatas serta memiliki tanggungan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan biaya pendidikan tinggi menjadi beban yang sulit ditanggung secara mandiri. Bagi sebagian penerima, bantuan program menjadi faktor penting yang memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan SMA/SMK. Lingkungan sosial perguruan tinggi juga memengaruhi pengalaman penerima manfaat. Mahasiswa 1K1S berinteraksi dengan mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi dan fasilitas pribadi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan rasa minder dan memengaruhi kepercayaan diri mahasiswa. UHW Perbanas merespons kondisi tersebut melalui layanan psikologis dan penguatan kepercayaan diri. Salah satu informan perguruan tinggi menjelaskan bahwa mahasiswa 1K1S memperoleh fasilitas pendidikan, asrama, transportasi, dan komputer, tetapi kesenjangan sosial di lingkungan kampus tetap perlu diperhatikan melalui pendampingan. (L.M, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UHW Perbanas, wawancara 9 Februari 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan pendidikan tinggi bagi keluarga

miskin tidak hanya berkaitan dengan biaya kuliah. Mahasiswa juga membutuhkan dukungan untuk menghadapi kebutuhan hidup, penggunaan teknologi, adaptasi sosial, dan tuntutan akademik. Karena itu, penyediaan beasiswa perlu disertai dukungan pendampingan agar mahasiswa dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pada aspek politik, dukungan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Program 1K1S terlihat melalui penyediaan Asrama Bibit Unggul, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta keterlibatan Yayasan Bhakti Persatuan dalam pembiayaan. Dukungan tersebut memberikan landasan bagi pelaksanaan program, tetapi keberlanjutan pembiayaan dan kerja sama tetap perlu dipantau karena berkaitan dengan kebijakan dan kemampuan anggaran pada periode berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi menjadi alasan penting keberadaan program, sedangkan dukungan politik dan anggaran menjadi faktor yang memungkinkan program dilaksanakan.

6. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana dalam model Van Meter dan Van Horn berkaitan dengan pemahaman, penerimaan, sikap, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya sikap positif dari beberapa kategori pelaksana, baik pemerintah, pengelola asrama, perguruan tinggi, maupun mitra pendanaan. Sikap tersebut terlihat melalui kesediaan pelaksana memberikan pendampingan dan merespons persoalan yang dihadapi mahasiswa. Pada tingkat perguruan tinggi, komitmen terlihat melalui pemberian bimbingan tambahan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan menggunakan teknologi, layanan psikologis, pemantauan IPK, serta bantuan dalam persiapan magang. Pada tingkat asrama, pendamping melakukan pengawasan terhadap aktivitas harian, memberikan motivasi, dan memperhatikan perkembangan akademik mahasiswa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksana tidak hanya menjalankan tugas sesuai fungsi administratif, tetapi juga memberikan respons terhadap kebutuhan penerima manfaat.

Persepsi penerima manfaat memperkuat temuan tersebut. Mahasiswa Poltekes menyampaikan bahwa pelayanan Dinas Sosial, UPTD, dan perguruan tinggi dinilai baik serta tetap menerapkan kedisiplinan. Ia juga menyatakan bahwa mahasiswa penerima 1K1S diperlakukan sama dengan mahasiswa reguler dalam kegiatan akademik. Mahasiswa UHW juga menilai pelayanan UHW responsif ketika menghadapi persoalan administrasi beasiswa dan kebutuhan kegiatan akademik. (R, mahasiswa penerima manfaat, wawancara 26 Januari 2026; F, mahasiswa penerima manfaat, wawancara 9 Februari 2026). Walaupun disposisi pelaksana cenderung mendukung implementasi, sebagian praktik pendampingan masih bergantung pada inisiatif individu. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena pergantian personel dapat memengaruhi pola pelayanan apabila praktik yang telah berjalan belum sepenuhnya menjadi prosedur kelembagaan. Penguatan mekanisme kerja, pembagian tanggung jawab, dokumentasi layanan, dan sistem monitoring diperlukan agar komitmen pelaksana dapat dipertahankan pada tingkat organisasi, bukan hanya pada individu tertentu.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program 1K1S

Temuan pada enam variabel menunjukkan bahwa implementasi Program 1K1S memiliki sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Standar dan tujuan kebijakan didukung oleh tujuan yang jelas serta pemahaman yang relatif sama antara pelaksana dan penerima manfaat, sedangkan keterbatasan data mengenai seluruh calon sasaran

menyebabkan tingkat ketepatan sasaran belum dapat dihitung secara menyeluruh. Sumber daya didukung oleh kombinasi pembiayaan APBD dan CSR serta fasilitas pendidikan dan asrama, tetapi masih terdapat kebutuhan perangkat belajar pribadi dan keterbatasan jumlah personel. Komunikasi antarorganisasi didukung oleh rapat, laporan, MoU, komunikasi langsung, dan grup WhatsApp, sementara perbedaan prosedur administrasi serta komunikasi publik yang belum merata masih menjadi hambatan. Karakteristik agen pelaksana didukung oleh pembagian fungsi antarlembaga dan kapasitas pendampingan, tetapi beberapa kegiatan masih bergantung pada inisiatif individu. Kondisi sosial-ekonomi-politik mendukung relevansi program karena penerima berasal dari keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan pemerintah daerah memberikan dukungan kebijakan serta anggaran, sedangkan kesenjangan sosial dan tuntutan adaptasi akademik menjadi tantangan bagi mahasiswa. Disposisi pelaksana menjadi faktor pendukung melalui sikap responsif, kepedulian, dan pendampingan, tetapi perlu diperkuat melalui mekanisme kelembagaan agar tidak bergantung pada figur tertentu Faktor pendukung dan penghambat implementasi Program 1K1S dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program 1K1S

Variabel	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Implikasi Pelaksanaan
Standar dan tujuan kebijakan	Tujuan program jelas dan dipahami pelaksana serta penerima	Data calon sasaran potensial dan rasio pendaftar belum tersedia secara lengkap	Penilaian ketepatan sasaran belum dapat dilakukan secara menyeluruh
Sumber daya	UKT, uang saku, asrama, permakanan, fasilitas belajar, dan pendampingan tersedia	Perangkat belajar pribadi dan jumlah personel masih terbatas	Dukungan utama tersedia, tetapi kebutuhan tambahan masih muncul
Komunikasi antarorganisasi	Rapat, laporan, MoU, komunikasi langsung, dan grup WhatsApp	Perbedaan prosedur administrasi dan sosialisasi publik belum merata	Koordinasi internal berjalan, tetapi standardisasi prosedur dan komunikasi publik perlu diperkuat
Karakteristik agen pelaksana	Pembagian peran antarlembaga relatif jelas dan terdapat dukungan akademik serta pendampingan	Sebagian tugas masih dirangkap dan beberapa kegiatan bergantung pada inisiatif individu	Kapasitas lembaga perlu diperkuat agar pelayanan tidak bergantung pada personel tertentu
Kondisi sosial, ekonomi, dan politik	Program sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin dan memperoleh dukungan pemerintah serta mitra	Kesenjangan sosial, adaptasi mahasiswa, dan tekanan akademik	Pendampingan sosial dan akademik perlu berjalan bersama bantuan pendidikan
Disposisi pelaksana	Pelaksana menunjukkan kepedulian, responsivitas, dan komitmen	Praktik baik belum seluruhnya terlembaga	Komitmen individu perlu diterjemahkan menjadi mekanisme kerja organisasi

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2026

Secara keseluruhan, implementasi Program 1K1S menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan, dan disposisi pelaksana saling berkaitan dalam menentukan pelaksanaan program. Faktor yang paling menentukan pada tahap pelaksanaan adalah ketersediaan sumber daya serta kemampuan koordinasi antaraktor untuk memastikan bantuan

pendidikan, fasilitas, informasi, dan pendampingan diterima sesuai kebutuhan mahasiswa. Program telah memberikan dukungan nyata terhadap keterjangkauan pendidikan tinggi bagi keluarga miskin, tetapi penelitian ini belum dapat menilai keberhasilan jangka panjang berupa kelulusan atau perubahan kondisi ekonomi keluarga. Penilaian tersebut memerlukan data longitudinal yang mengikuti perkembangan mahasiswa sejak menerima program hingga menyelesaikan pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (1K1S) di Kota Surabaya berdasarkan enam variabel Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan telah dipahami pelaksana dan penerima manfaat. Sumber daya mendukung pelaksanaan melalui pembiayaan UKT, uang saku, asrama, permakanan, dan pembinaan, meskipun fasilitas belajar masih terbatas. Komunikasi dan koordinasi antarorganisasi telah berjalan, tetapi masih terdapat kendala informasi dan administrasi. Pembagian peran antara Dinas Sosial, UPTD Kampung Anak Negeri, yayasan, dan perguruan tinggi mitra telah terbentuk. Kondisi sosial-ekonomi-politik memengaruhi kebutuhan dan kemampuan adaptasi mahasiswa, sedangkan disposisi pelaksana terlihat melalui komitmen, pendampingan, dan pengawasan. Penguatan diperlukan pada komunikasi, koordinasi, fasilitas belajar, dan pendampingan.

Program 1K1S telah memberikan dukungan terhadap keterjangkauan pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga miskin, tetapi penelitian belum dapat menyimpulkan keberhasilan program dalam memutus rantai kemiskinan atau mencapai outcome kelulusan karena program masih tahap awal. Keterbatasan penelitian meliputi jumlah informan, periode pengamatan, dan belum tersedianya data untuk mengukur jangkauan program terhadap seluruh keluarga yang memenuhi kriteria. Dinas Sosial perlu memperluas sosialisasi dan memperkuat pemantauan pendaftar serta penerima manfaat. Dinas Sosial, UPTD, yayasan, dan perguruan tinggi perlu meningkatkan koordinasi dan penanganan kendala, sedangkan perguruan tinggi dan pengelola asrama perlu memperkuat fasilitas serta pendampingan akademik dan sosial. Evaluasi longitudinal diperlukan untuk memantau keberlanjutan studi hingga kelulusan.

Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

a. Dinas Sosial Kota Surabaya perlu memperluas sosialisasi Program 1K1S melalui kelurahan, kecamatan, dan media resmi dengan informasi persyaratan dan alur pendaftaran yang jelas.
b. Dinas Sosial, perguruan tinggi mitra, dan pengelola asrama perlu memenuhi kebutuhan sarana belajar, khususnya laptop dan fasilitas pendukung, melalui pendataan kebutuhan secara berkala.
c. Perguruan tinggi mitra dan pengelola asrama perlu memperkuat pendampingan akademik dan sosial melalui pemantauan studi, konsultasi, serta penanganan kesulitan mahasiswa.
d. Dinas Sosial, UPTD Kampung Anak Negeri, yayasan, dan perguruan tinggi mitra perlu memperkuat koordinasi dan evaluasi program secara berkala untuk menangani kendala administratif serta memantau keberlanjutan studi dan kelulusan penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Almashuri, I., & Subandi, B. (2021). Pendistribusian dana zakat pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur. *Journal of Islamic Management, 1*(1), 30–42. https://doi.org/10.15642/jim.v1i1.387

Asnawi, A. R., Wiyono, B. B., & Sunandar, A. (2021). Policy evaluation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in Indonesia's education outcomes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 11*(2), 556–566. https://doi.org/10.26858/jiap.v11i2.30363

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Statistik pendidikan Provinsi Jawa Timur 2024*. BPS Provinsi Jawa Timur. https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjMyIzI=/angka-partisipasi-sekolah-aps-.html

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Fitri, U., & Novandri, R. (2022). Implementasi kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagai langkah penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman. *JOELS: Journal of Election and Leadership, 3*(2), 93–101. https://doi.org/10.31849/joels.v3i2.10571

Hussein, M. H., Albab, U., & Fatah, Z. (2023). Implementasi Program Satu Desa Dua Sarjana dalam membantu mencegah kesenjangan pendidikan di Kabupaten Blora. *SAP: Soetomo Administrasi Publik, 1*(3), 145–160.

Irianto, H., Nurany, F., & Puteri, A. P. (2024). Implementasi kebijakan Program Beasiswa Pemuda Tangguh. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 8*(2), 167–184. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v8i2.5858

Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 3*(3), 72–80. https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i3.14342

Mulyaningsih, T., Dong, S., Miranti, R., Daly, A., & Purwaningsih, Y. (2022). Targeted scholarship for higher education and academic performance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Educational Development, 88*, 102510. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102510

Novitasari, S., Siswanto, D., & Ambarwati, A. (2025). Improving educational equity through the Smart Indonesia Card for College: Policy implementation and challenges. *Jurnal Public Policy, 11*(1), 79–88. https://doi.org/10.35308/jpp.v11i1.10413

Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa*. JDIH Pemerintah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya. (2024a). *Kaleidoskop 2024: Pemkot Surabaya tingkatkan akses pendidikan lewat program beasiswa hingga 1 Keluarga 1 Sarjana*. Pemerintah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya. (2024b). *Wujudkan cita-cita anak dari keluarga tidak mampu, Wali Kota Eri resmikan Asrama Bibit Unggul*. Pemerintah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya. (2025). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa*. JDIH Pemerintah Kota Surabaya.

Rahmawati, D., & Adi, A. S. (2024). Implementasi Program Beasiswa Genius S1 dalam mengatasi kesenjangan pendidikan tingkat sarjana di Kabupaten Bojonegoro. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 12*(2), 203–212.

Safira, F. D., Ardini, H. R., Anggraeni, A. A., Maharani, N. S., & Reviandani, O. (2025). Implementasi Program 1 Kartu Keluarga 1 Sarjana di Kota Surabaya. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3*(2), 917–925. https://doi.org/10.61579/future.v3i2.505

Siburian, M. E. (2024). The impact of education on inequality in a decentralized Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy, 29*(4), 1995–2006. https://doi.org/10.1080/13547860.2023.2229653

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Alfabeta*.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society, 6*(4), 445–488.

https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam peningkatan akses pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 6*(1), 44–53. https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53